

FORMULIR PENGISIAN DATA YANG DIKECUALIKAN

A. BERSIFAT UMUM

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEMUA UNIT KERJA	Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan		
		Arsip/dokumen naskah dinas yangklasifikasinya sangat rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangandan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambatproses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan		
		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf iUU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankanproses pengambilan kebijakan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf iUU No. 43 Tahun 2009	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen		
		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)yang belum didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008UU No.43 Tahun 2009	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijaka	Melindungi kerahasiaan dokumen		
		Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf iUU No.43 Tahun 2009	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none">• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf j• UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik	Selama masih digunakan	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		
		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j• UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan olehpihak lain dan membahayakankeamanan	Keamanan Sistem		
		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none">• UU No.14 Tahun 2008• UU No.11 Tahun 2008	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan olehpihak lain dan membahayakankeamanan	Keamanan Sistem		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		
		Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan		
		Opini Hukum	<ul style="list-style-type: none"> UUD Tahun 1945 Pasal 28D 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proses Hukum Pegawai ASN yang bermasalah	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan h	Tidak Terbatas	Menghambat proses Penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf jUU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)		
		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf jUU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Spesifikasi sarana komunikasisandi	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 pasal17 huruf cUU No 11 Tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem		
		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf jUU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		
		Data Elektronik PNS Database	<ul style="list-style-type: none">UUD Tahun 1945 pasal 28 GUU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yangbersifat rahasia		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen/Berkas/Arsip PNS masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none">• UUD Tahun 1945 pasal 28 G• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan / perceraian	<ul style="list-style-type: none">• UUD Tahun 1945 pasal 28 G• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none">• UUD Tahun 1945 pasal 28 G• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none">• UUD Tahun 1945 pasal 28 G• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan I • PP No. 100 Tahun 2000 	Sampai pelantikan	Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum		
		Data rencana penempatan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I 	Sampai dengan penyerahan SK Gubernur kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif		
		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 11 Tahun 2008 pasal 17 huruf c 	Selama Sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Data User Name dan Password Aplikasi penguasaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008pasal 17 huruf f	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan oleh pihaklain dan membahayakan keamanan serta privasi	Melindungi kerahasiaan dokumen dan keamanan sistem		
		Laporan Kekayaan gaji dan kondisi keuangan asset dan rekening bank atas nama pribadi	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008pasal 17 huruf h	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan LHKPN	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan dokumen		
		Laporan Pajak Pribadi	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008Pasal 17 huruf h	30 tahun sejak dilaporkan	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaandokumen		

B. BERSIFAT KHUSUS

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Kode Akses Elektronik, Sidik Jari, Web pemerintah	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17huruf jUU No.11 Tahun 2008pasal 1 angka 16	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		
		Sistem Persandian(perangkat, saranaperalatan, tempat kegiatan sandi)	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem		
		Sistem ManagementDatabase	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf jUU No.11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihaklain dan membahayakan keamanan	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perangkat KhususPersandian	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem		
		Penempatan jaringan,peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	<ul style="list-style-type: none">UU No 11 tahun 2008huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem		
		Sistem keamanan website / aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfos	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan system		
3.	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROV. SULTRA	Rincian Hasil UjiKompetensi PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulisdari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Naskah ujian tertulis bagi bakal calon Pimpinan BUMD	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan		
		Kunci Sistem Sandi Biro	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara		
		Dokumen proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan		
		Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai dengan yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nomor Polisi RahasiaMobil Jabatan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Selama masih berlaku	Dapat membahayakan keamanan pejabat daerah secara kedinasan	Terlindunginya keamanan pejabat daerah baik secara kedinasan		
4	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Informasi Status Kepemilikan Tanah Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008Pasal 17 huruf d dan i	Sampai ada konfirmasi resmi dari BPKAD Prov.Sultra atas surat permohonan	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan Dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila disalahgunakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan Menghindari ada permasalahan hukum di kemudian hari		
		Sertifikat Tanah Penguasaan Pemprov. Sultra	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008Pasal 17 huruf d dan i	Tak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan /kebijakan		
		Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih belum proses/belum diaudit/belum dituangkan dalam perda	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008pasal 17 huruf I	Sampai dengan LKPD dituangkan dalam bentu Peraturan Daerah	Mengganggu proses penyusunan/ menghambatproses audited	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan data selamat proses audited		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Data Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ditetapkan Daftar Barang Milik Daerah di Audited	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengadilan keputusan/ kebijakan		
		Semua data – data dan dokumen Pemindahtanganan dengan cara Hibah dan Tukar Menukar	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak Terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan/ dokumen disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan dokumen		
		Draft Ringkasan RKA-SKPD	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf iUU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Setelah disahkan	Mengganggu/ menghambat proses penyusunan keputusan/ kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan		
		Draft Ringkasan RKA-PPKD	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf iUU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 huruf i	Setelah disahkan	Mengganggu/ menghambat Proses penyusunan keputusan/ kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen dan mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Proses dan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17	Tidak terbatas	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data dan Menghambat pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkandung dalam Dokumen Hasil Pemeriksaan menyangkut informasi yang dimiliki oleh pihak yang diaudit (auditee), yang memiliki kemungkinan sifat rahasia. Untuk membuka informasi tersebut harus seijin pemiliki informasi, yaitu audite.	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunaan data dan mengamankan proses pengambilan keputusan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	RUMAH SAKIT JIWA	Daftar nama pasien	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 huruf c• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 huruf i	Kepentingan Kesehatan Permintaan aparat penegak hukum Persetujuan pasien	Membahayakan rahasia pribadi pasien	Memberikan kenyamanan dan keamanan data pada pasien		
		Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 46• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor	Informasi medis Pasien yang terdapat pada rekam medis dapat dimanfaatkan atas persetujuan pasien atau keluarganya yang berhak, dengan cara mengajukan surat	Membuka kerahasiaan pribadi	Memberikan kenyamanan dan keamanan pada pasien		

			36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	tertulis kepada Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan harus tetap dijaga kerahasiaanya				
6	BIRO HUKUM	Dokumen Produk Hukum Daerah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai diundangkan	Dapat menghambat proses	Proses sesuai prosedur dan mekanisme		
		Dokumen Perkara	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 8 Tahun 1991 UU No. 2 Tahun 1986 UU No.5 Tahun 1986 Permendagri No. 12 Tahun 2014 	Sampai perkara <i>inkracht</i>	Kemungkinan pihak lawan dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, perkara bisa kalah di pengadilan	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik		
		Dokumen Pendampingan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU No.8 Tahun 1991 Permendagri No. 12 Tahun 2014 	Sampai perkaranya telah diputus oleh pengadilan	Identitas, data dan rahasia dari aparaturnya diketahui publik	Melindungi identitas, data dan rahasia dari aparaturnya		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Permohonan Bantuan Hukum dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• UU No.8 Tahun 1991• UU No.2 Tahun 1986• UU No. 5 Tahun 1986	Sampai perkara <i>inkracht</i>	Kemungkinan pihak lawan dapat mengetahui dokumen yang dimiliki, perkara bisa kalah di pengadilan	Proses penanganan perkara dapat berjalan dengan baik		
		Dokumen Permohonan Perlindungan Hukum dari Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Permendagri No.12 Tahun 2014	Sampai selesainya tindak lanjut perlindungan hukum	Identitas pemohon dan masalah hukum terungkap	Masalah hukum tidak diketahui publik sebelum ada tindak lanjut		
		Rancangan Peraturan –peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• Permendagri No. 13 Tahun 2006	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		
		Rancangan Keputusan –Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005	Setelah ditetapkan dan disahkan menjadi SK	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dokumen Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• UU No. 15 Tahun 2004	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		
		Dokumen Hasil Verifikasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Belanja	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• UU No. 15 Tahun 2004	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		
		Dokumen Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar di Rekening Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• UU No. 1 Tahun 2004	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		
		Dokumen Proses Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Miliki Daerah	<ul style="list-style-type: none">• UU KIP No. 14 Tahun 2008• Peraturan Menteri Keuangan RI	Apabila terdapat permintaan tertulis untuk pemeriksaan, permintaan instansi lain dan telah ditandatangani oleh pejabat berwenang	Apabila dibuka berpeluang terjadinya penyalahgunaan	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULTRA	Data Retribusi penjualanbenih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP No. 14 Tahun 2008 Perda No. 3 Tahun 2018 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen		
8	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA PROV. SULTRA	Surat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenang	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 KIP Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat		
		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat pada pelaksanaan tender/seleksi	Peserta tender berkompetisi secara sehat dan adil		
		Data Tender/Seleksi yang tidak ditampilkan dihalaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 19 Tahun 2016 	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Data Pengguna LPSE	UU No. 19 Tahun 2016	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik		
		Data Penyedia di LPSE	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008• UU No. 5 Tahun 1999• UU No. 30 Tahun 2000	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat		
		Resume Proses Lelang	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 5 Tahun 1999	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Data Proses Pemilihan Penyedia	UU No. 5 Tahun 1999	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat		
		LPSE Support	<ul style="list-style-type: none">UU No.11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada publik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik		
		Data <i>log in</i> akses server yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	<ul style="list-style-type: none">UU No.11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan c	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga penegak hukum	Hak akses server bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. SULTRA	Data Perusahaan yang mengajukan permohonan pengujian sampel	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan		
		Data hasil pengujian sampel perusahaan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan		
		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Kemasan Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan		
		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Mutu Produk Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan		
		Data IKM yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Pemahaman Merek pada Industri Olahan Pangan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data/rahasia perusahaan	Menjaga keamanan data/rahasia perusahaan		

No	SUMBER INFORMASI	Rincian Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	√	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. SULTRA	Dokumen Peserta Diklat terkait dengan Riwayat pegawai dan keluarga, Kesehatan, kapasitas intelektualitas catatan pribadi	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan data	Melindungi kerahasiaan Dokumen		
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. SULTRA	Penertiban Objek yang diduga melanggar perijinan	<ul style="list-style-type: none">UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17a angka 1, angka 4 dan angka 5	Proses Persidangan	Menghambat proses penegakan Hukum	Memperlancar proses penegakan hukum		